

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang 1945 alinea ke 4. Kesejahteraan umum diwujudkan melalui program pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan merata di segala bidang kehidupan bernegara. Menurut Sukirno (dalam Widiastuti, 2008:1) menyatakan bahwa kesejahteraan bersifat subyektif dimana setiap orang mempunyai pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda terhadap faktor- faktor yang menentukan kesejahteraan. Seseorang dapat dikatakan hidup sejahtera jika orang tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidup, baik secara material maupun spiritual.

Kebutuhan material yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Sedangkan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, ibadah, keamanan, dihormati dan dihargai orang lain termasuk kebutuhan spiritual. Kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah pembangunan yang bersifat multidimensi yang hadir ditengah masyarakat, baik di negara berkembang maupun negara maju. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat ditandai oleh keterbelakangan sumber daya manusia, keterisolasiannya tempat tinggal dan pengangguran yang terus

meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor dan antar penduduk.

Pendapat ini didukung oleh Chambers (dalam Suyanto 2013:12) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu : 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan terhadap situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Menurut Suharto (2005:135) kemiskinan merujuk pada kurangnya jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Definisi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat seperti faktor internal dan eksternal.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial sebagai lembaga yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin di Indonesia. Salah satu program yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Adapun bentuk program yang dilaksanakan adalah Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan penguatan modal usaha untuk memfasilitasi kelompok fakir miskin yang telah diwadahi dalam KUBE untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia dirasakan sudah sangat mendesak khususnya bagi keluarga miskin. Salah satu daerah di Provinsi

Lampung yang mendapat bantuan program P2FM adalah Kabupaten Lampung Timur. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 mencatat jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 25.156 KK. Dari data dapat dilihat masih ada keluarga miskin di Kabupaten Lampung Timur yang perlu mendapat bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Melalui program pemberdayaan keluarga miskin dirancang untuk mengurangi terjadi peningkatan kemiskinan yang lebih besar, dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial berarti peningkatan kapasitas (*capacity building*) agar para penerima pelayanan sosial memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam memenuhi kebutuhan dasar. Usaha penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga miskin yang dilaksanakan pemerintah salah satunya adalah program pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program ini ditujukan untuk memotivasi keluarga miskin agar lebih maju, mampu bekerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi sumber sosial lokal dan memperkuat budaya kewirausahaan.

Kegiatan UEP yang dikembangkan meliputi jenis usaha peternakan, perikanan, pertanian, industri rumah tangga, jasa dan usaha ekonomi lainnya. Pemerintah memberikan bantuan modal usaha, sarana dan prasarana, santunan hidup yang disalurkan langsung melalui mekanisme perbankan. Pembinaan usaha ekonomi produktif diarahkan pada kesinambungan usaha, yang dapat meningkatkan volume usaha sehingga dalam skala besar dapat diarahkan menjalin kemitraan dengan pengusaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 (Departemen Sosial RI 2009:3) tentang pelaksanaan pemberian bantuan sosial keluarga miskin dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lintas kabupaten/kota yang mengacu pada pasal 10 UU No.32 tahun 2004, maka pemberdayaan untuk keluarga miskin dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE pemerintah mempunyai mekanisme pelaksanaan program yaitu adanya pembina teknis wilayah dengan dukungan anggaran APBD atau sering disebut Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan fungsi melakukan pendampingan terhadap keluarga miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2013 Kabupaten Lampung Timur mendapat bantuan program KUBE yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur. Departemen Sosial RI (2005:39) menyatakan PSM dibentuk dan ditentukan oleh ketua Tim Pembina (Bupati/Walikota). PSM berguna untuk memecahkan masalah, mengembangkan KUBE agar tumbuh, berkembang dan mandiri. Adapun nama-nama KUBE yang ada di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

Tabel 1. NAMA-NAMA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI DESA TOTO MULYO KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	Nama KUBE	Nama desa
1	Usaha Mandiri 2	Toto Mulyo
2	Usaha Mandiri 3	Toto Mulyo

3	Usaha Mandiri 5	Toto Mulyo
4	Usaha Mandiri 6	Toto Mulyo
5	Usaha Mandiri 7	Toto Mulyo

Sumber : Kecamatan Way Bungur tahun 2013

KUBE diatas merupakan kelompok usaha binaan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur tahun 2013. KUBE ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga miskin. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merespon adanya keluarga miskin dengan memberikan bantuan modal usaha agar kelompok miskin dapat menggali dan mengembangkan potensi alam setempat yaitu di bidang perikanan. Berdasarkan atas proposal KUBE yang diajukan menyatakan alasan memilih usaha bidang perikanan karena ketersediaan pakan alami ikan , adanya sumber air, mudahnya akses transportasi dan tingginya permintaan pasar.

Oleh karena itu, KUBE yang ada di Desa Toto Mulyo akan mengelola pembesaran ikan gurame, dengan jumlah anggota 10 orang per kelompok. Akan tetapi, kondisi masyarakat yang minim pengetahuan, keterbatasan modal usaha serta pengalaman yang kurang memadai menyebabkan keluarga miskin tersebut kesulitan mengembangkan dan memanfaatkan sumber lokal yang ada. Oleh karena itu, PSM harus mendampingi keluarga miskin tersebut agar berkembang lebih baik.. PSM harus memahami etika serta wajib menjalankan tahapan-tahapan norma yang berlaku.

Program pemberdayaan KUBE akan berjalan dengan baik apabila PSM menjalankan perannya secara konsisten dan tepat sasaran. Pemberdayaan harus dilakukan berkesinambungan yang mengacu pada aturan yang ada.

PSM dalam pemberdayaan keluarga miskin dapat dikatakan berhasil jika telah menjalankan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sesuai aturan normatif dan masyarakat miskin menjadi mandiri dan nantinya dapat lepas dari bantuan pemerintah. Meskipun, proses pelaksanaan pendampingan fakir miskin terkadang antara teori dengan pelaksanaan PSM di lapangan tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pra-riset penulis pada tanggal 25 Februari 2014 di KUBE Usaha Mandiri 6 Desa Toto Mulyo menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara pemilihan jenis usaha yang dikembangkan anggota KUBE dengan potensi alam yang ada. Adapun beberapa penelitian sebelumnya terkait peran PSM dalam pendampingan KUBE diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat (2009) tentang bagaimana peranan pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Tangsi Duren dan Kelurahan Tangsi Baru Kecamatan Kabawean Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendamping KUBE di Tangsi Duren memiliki peranan penting dalam memberdayakan kelompok untuk dapat mencapai keberhasilan KUBE berprestasi tingkat Provinsi. Peran dari pendamping yang berjalan aktif berkesinambungan dengan waktu fleksibel yaitu pemberi informasi, perencana, pembimbing, motivator, fasilitator, penghubung, mobilisator, advokator, dan evaluator. Untuk peran sebagai pembimbing dan motivator terus dilakukan aktif berkesinambungan sampai saat ini.

Sedangkan peran pendamping pada KUBE Tangsi Baru hanya berjalan pada awal bantuan BLPS diterima dan peran yang dilakukan tidak berkesinambungan. Adapun peran yang dilaksanakan pendamping KUBE "Bina Tani" yakni sebagai pemberi informasi, motivator, fasilitator, dan pembimbing.

2. Penelitian yang dilakukan Untung Basuki (1997:173) tentang peranan pembina kelompok dalam pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang diukur dari kondisi kehidupan keluarga miskin, efektivitas peranan pembina kelompok dalam pengembangan KUBE serta hubungan antara pelaksanaan peranan pembina kelompok tersebut terhadap kinerja KUBE binaan mereka.

Hasil penelitian menyatakan pertama; kondisi kehidupan keluarga miskin di daerah ini umumnya dicirikan dengan kepemilikan tanah pertanian yang kecil (dibawah 0,50 ha). Kedua; program BKS yang ditunjukkan untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan KUBE masih dihadapkan pada kinerja para pembina kelompok yang belum semua dapat berperan secara efektif. Ketiga; intensitas pembinaan yang tinggi oleh pembina kelompok KUBE akan diikuti dengan prestasi KUBE binaan yang tinggi. Sebaliknya intensitas pembinaan yang rendah oleh pembina kelompok KUBE akan diikuti kinerja yang rendah pula.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fazra Raissa Wulandari (2011:63) di Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Tangerang tentang bagaimana peran PSM dalam pemberdayaan KUBE. Hasil penelitian

menyatakan pelaksanaan peran PSM dalam pemberdayaan keluarga miskin dilakukan enam tahap pendampingan yaitu perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, fasilitator, evaluator.

Dari beberapa penelitian diatas, semuanya melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai peran pendamping KUBE dalam pemberdayaan keluarga miskin. Namun beberapa penelitian diatas belum ada yang secara khusus membahas atau membagi peran pendamping KUBE dalam pemberdayaan keluarga miskin dilihat dari aspek normatif dan yang diharapkan dengan berdasarkan buku pedoman umum pendampingan KUBE. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu selain penelitian ini membagi peran pendamping KUBE secara normatif dan yang diharapkan, lokasi penelitiannya pun berbeda. Yaitu di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur tahun 2013.

Pada hasil penelitian Rahmat Hidayat menyatakan peran PSM di Desa Tangsi duren dan Kelurahan Tangsi Baru menunjukkan perbedaan yaitu peran PSM di Desa Tangsi Duren sudah berjalan baik sedangkan peran PSM di Kelurahan Tangsi baru belum berjalan baik. Hasil penelitian Untung Basuki menunjukkan peran PSM dalam pengembangan KUBE belum efektif. Sedangkan hasil penelitian Fazra Raissa Wulandari menyatakan peran PSM dalam pemberdayaan keluarga miskin di Desa Lebak Wangi sudah berjalan baik.

Berdasarkan Perbedaan hasil penelitian diatas menarik peneliti untuk mengkaji kembali peran PSM dalam pemberdayaan keluarga miskin namun di ukur dari sisi aturan (normatif) dan peran yang diharapkan (keberhasilan PSM) sesuai buku pedoman umum pemberdayaan KUBE yang berlaku. Adapun pendamping KUBE yang dimaksud adalah PSM Desa Toto Mulyo yang menjalankan fungsi sosialnya sehingga peneliti tertarik untuk meneliti subyek diatas dengan judul :

“Peran Pekerja Sosial Pendamping Kelompok Usaha bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur tahun 2013”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran normatif PSM dalam memberdayakan keluarga miskin di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur dapat dinyatakan berjalan baik ?
- b. Bagaimana peran PSM yang diharapkan dalam memberdayakan keluarga miskin di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur dinyatakan tidak berjalan baik ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menguji hipotesis yang menyatakan :

- a. Peran PSM secara normatif diindikasikan berjalan baik dalam memberdayakan Keluarga Miskin di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

- b. Peran PSM yang diharapkan diindikasikan tidak berjalan baik dalam pemberdayaan Keluarga Miskin di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Keterujian hipotesis pro dan kontra dari hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan :
 1. Peran normatif PSM sudah berjalan dengan baik dalam memberdayakan Keluarga Miskin di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.
 2. Peran PSM yang diharapkan dinyatakan tidak berjalan baik dalam pemberdayaan Keluarga Miskin di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.
 3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksana kebijakan dalam lingkup kesejahteraan sosial. Khususnya PSM di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.